



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : ASISTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANNA FAJRIATIN
2. Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
3. NHK : 434236

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.429.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/206 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , Rp. 863.000.000
2. Tanah Seluas 2.007 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah Seluas 2.804 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, Rp. 96.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.030.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.282.500.000

1. MOTOR, VESPA SPRINT I-GET 150 / SCOOTER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 44.000.000
2. MOBIL, HONDA CR-V 1.5 TC PRESTIGE CVT JEEP 4X2 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 497.000.000
3. MOBIL, BYD MINIBUS Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 741.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 663.911.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 963.537.399

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	6.338.948.399
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.338.948.399

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.